

# PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA NONPERTANIAN DI PEDESAAN INDONESIA

Rin Purwani BUDI\*

## PENDAHULUAN

Masalah kesempatan kerja sebenarnya merupakan salah satu segi masalah angkatan kerja dan berhubungan erat dengan masalah kependudukan. Seperti beberapa negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi menyebabkan jumlah angkatan kerja bertambah dengan cepat pula, yaitu sekitar 2,5% per tahun. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja tercermin pada tingkat kesempatan kerja. Keadaan di Indonesia menunjukkan jumlah penawaran tenaga kerja yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan meluasnya permintaan tenaga kerja. Dengan demikian timbullah masalah penyerapan tenaga kerja.

Angka-angka menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Setiap tahun Indonesia membutuhkan sekitar satu juta tambahan kesempatan kerja. Akan tetapi kesempatan kerja yang tercipta tidak dapat mencapai jumlah tersebut. Akibatnya kesempatan kerja yang ada lalu dibagi-bagi agar lebih banyak orang memperoleh upah. Dengan demikian terjadi pemanfaatan tenaga kerja secara tidak penuh dan upah yang rendah. Penggunaan tenaga kerja secara tidak penuh di Indonesia mencapai belasan juta.<sup>1</sup>

Sebagian besar penduduk Indonesia yaitu sekitar 80% tinggal di pedesaan dan pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu pembicaraan-pembicaraan mengenai kebijaksanaan pembangunan pedesaan lebih dititik beratkan pada usaha-usaha perbaikan dan pengembangan sektor pertanian. Meskipun demikian ada juga penduduk pedesaan yang mempunyai mata pencaharian di luar sektor pertanian, atau mengkombinasi-

\* Staf CSIS

1 *Kompas*, tajuk 28 Oktober 1980

kan dua macam pekerjaan, yaitu sebagai petani dan pekerja di sektor nonpertanian. Pengembangan pedesaan yang dikaitkan hanya dengan pengembangan sektor pertanian yang meliputi segi-segi kelembagaan infrastruktur, teknik dan ekonominya, mengakibatkan kegiatan-kegiatan di luar pertanian kurang mendapat perhatian. Sesungguhnya, perluasan sektor nonpertanian di pedesaan dapat mencegah arus urbanisasi. Sebab biasanya sektor nonpertanian hanya berkembang di kota, sehingga penduduk desa berduyun-duyun ke kota. Di samping itu, sektor nonpertanian dapat dikembangkan sedemikian rupa, sehingga saling menunjang dengan sektor pertanian. Dengan demikian akan tercipta kesempatan kerja yang lebih luas dan terdapat kemungkinan peningkatan pendapatan penduduk pedesaan. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran mengenai pentingnya perluasan kegiatan nonpertanian ditinjau dari sudut sumbangannya dalam menambah kesempatan kerja dan pendapatan angkatan kerja pedesaan. Bagian pertama tulisan ini menunjukkan alasan-alasan perlunya diciptakan kesempatan kerja baru di luar sektor pertanian. Kesempatan kerja di pedesaan tersebut harus dapat tumbuh dan berkembang bersama saling menunjang dengan sektor pertanian. Bagian keduanya, meninjau keadaan angkatan kerja pedesaan dan kemungkinannya untuk diserap dalam kesempatan kerja nonpertanian di pedesaan yang dimaksud di atas.

## PENTINGNYA PENGEMBANGAN SEKTOR NONPERTANIAN DI PEDESAAN

Di kebanyakan negara berkembang, sering dijumpai keadaan yang memberikan gambaran dominannya sektor pertanian dalam perekonomiannya secara keseluruhan.

Ditinjau dari sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto, ataupun dalam hubungannya dengan penyediaan kesempatan kerja, dia memang patut mendapatkan perhatian utama demi perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi setelah melalui suatu proses dalam jangka waktu yang cukup panjang, segera tampak gejala-gejala semakin menurunnya peranan sektor pertanian. Pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan peranan perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian berangsur-angsur digantikan oleh sektor-sektor lain di luar pertanian. Lama kelamaan peranan sektor pertanian semakin kecil dan digantikan oleh sektor-sektor lain, di antaranya sektor jasa dan industri.

Dari tahun 1961 sampai tahun 1971, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,01% per tahun. Dalam periode ini, sektor pertanian berkembang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,9% per tahun, sedangkan perkembangan sektor industri 5,2%

setahun dan sektor jasa sebesar 4,8% per tahun (lihat Tabel 1 dan 2). Pada periode 1971-1976, sektor pertanian berkembang sebesar hanya 20,9% (dengan rata-rata 3,9% per tahun), sedangkan sektor industri berkembang sebesar 82% (rata-rata tingkat perkembangan 12,7% per tahun) dan sektor jasa berkembang sebesar 51,3% (dengan tingkat perkembangan rata-rata sebesar 8,6% per tahun). Di tahun 1961, bagian (share) sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto adalah 49% dan turun menjadi 44% di tahun 1971 dan turun lagi menjadi 36% di tahun 1976. Sebaliknya bagian sektor nonpertanian bertambah. Bagian sektor industri yang hanya 23% di tahun 1961 menjadi 32% di tahun 1976 sedangkan bagian sektor jasa bertambah dari 28% di tahun 1961 menjadi 32% di tahun 1976.<sup>1</sup>

Tabel 1

PERUBAHAN STRUKTUR DAN TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1961-1976*								
Tahun	Pertanian		Industri		Jasa		Total	
	PDB (Rp) milyar	Share (%)	PDB (Rp) milyar	Share (%)	PDB (Rp) milyar	Share (%)	PDB (Rp) milyar	Share (%)
1961	1.840	48,7	871	23,0	1.070	28,3	3.781	100,00
1971	2.441	43,6	1.447	25,8	1.712	30,6	5.600	100,00
1976	2.952	36,1	2.633	32,2	2.591	31,7	8.176	100,00

\* Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1971-1976 dalam harga nyata 1973. PDB 1961 berasal dari harga nyata 1960 dan dikonservasi ke dalam harga nyata 1973 dengan menggunakan rasio harga nyata 1973 dan 1960 yang dihitung berdasarkan tahun 1969, 1970 dan 1971.<sup>2</sup>

Sumber: Biro Pusat Statistik

Tabel 2

TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1961-1976 (% per tahun)				
Tahun	Pertanian	Industri	Jasa	Total
1961 - 1971	2,9	5,2	4,8	4,0
1971 - 1976	3,9	12,7	8,6	7,9

Sumber: Biro Pusat Statistik

1 M. Nazir, "Kaitan Antara Sektor Pertanian dan Nonpertanian di Indonesia", *Agro Ekonomika* No. 11 tahun X, Oktober 1979, p. 55

2 *Ibid.*, p. 57

Struktur ekonomi Indonesia yang agraris seharusnya mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi sebagian besar penduduknya di sektor pertanian. Namun kenyataannya tidaklah menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan. Banyak pengangguran baik penuh maupun setengah pengangguran di pedesaan Indonesia.

Salah satu sebab bertambahnya pengangguran di pedesaan adalah tanah pertanian sudah tidak mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.<sup>1</sup> Penyebaran penduduk yang tidak merata, yaitu lebih dari setengah jumlah penduduk tinggal di Pulau Jawa menyebabkan sektor pertanian di pulau tersebut menanggung beban terlalu berat.

Jumlah tanah pertanian di Indonesia adalah 16,4 juta hektar atau hanya 8,6% dari luas tanah yang ada. Sedangkan luas areal sawahnya hanya 6,5 juta hektar. Tanah pertanian yang dimiliki petani yang sudah dirasakan sempit ini akan semakin menyempit dan berkeping-keping lagi mengingat sistem warisan masih kuat. Nyatanya jumlah anak yang dimiliki oleh suatu keluarga relatif masih besar. Beban tanah pertanian di Indonesia diperkirakan sebagai terlihat dalam Tabel 3.<sup>2</sup>

Tabel 3

JUMLAH PENDUDUK DAN BEBAN TANAH PERTANIAN TAHUN 1975-1999		
Tahun	Penduduk (juta)	Beban Tanah Pertanian (orang per km <sup>2</sup> )
1975	132	810
1978	142	870
1980	150	920
1999	192	1.170

Sumber: Pidato Moh. Suryani dalam Upacara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-24, Februari 1979, p. 8

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 1980-an setiap km<sup>2</sup> tanah pertanian di Indonesia menanggung beban 920 orang penduduk. Dari segi tanah pertanian saja dapat dilihat suatu permasalahan bagi para petani, yaitu kurangnya tanah garapan.

1 Rozy Munir, "Pertumbuhan Penduduk dan Masalah Tenaga Kerja di Pertanian", *Wawasan* No. 1 tahun I/1979, p. 66

2 *Ibid.*, p. 66

Dengan areal tanah yang sempit (kurang dari 0,5 hektar untuk setiap usaha tani) akan sulit bagi para petani baik secara teknis maupun ekonomis untuk dapat mengembangkan kegiatan produksi sampai tingkat dapat memberikan kecukupan hidup. Dengan tanah yang sempit itu, para petani kurang tanggap terhadap inovasi baru (pestisida, bibit unggul dan lain-lain). Demikian pula terhadap permintaan pasar. Maka apapun kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pertanian apabila belum menyangkut kebijaksanaan pemilikan tanah, kiranya hal itu hanya akan semakin memperkuat golongan petani kaya saja.<sup>1</sup> Untuk melihat banyaknya usaha tani dan luas tanah garapan yang dimiliki di Pulau Jawa disajikan Tabel 4. Dari angka-angka yang terdapat dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para petani memiliki tanah kurang dari 0,50 hektar atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Mereka bekerja sebagai buruh tani yaitu mengerjakan sawah orang lain dengan mendapatkan upah. Jumlah para petani yang termasuk dalam golongan ini sekitar 57%, dan menguasai tanah hanya seluas kira-kira 22% dari seluruh luas tanah garapan di Pulau Jawa.

Tabel 4

---



---

PROSENTASE DISTRIBUSI USAHA TANI DAN LUAS TANAH YANG DIMILIKI DI PULAU JAWA

---

Golongan luas tanah garapan (hektar)	jumlah usaha tani (%)	jumlah luas tanah garapan (%)
0 - 0,50	57,4	22,7
0,50 - 1,00	24,8	26,6
1,00 - 5,00	17,3	45,1
5,00 - <5,00	0,5	5,6
Jumlah	100,0	100,0

---

Sumber: Diolah dari *Sensus Pertanian 1973*, Biro Pusat Statistik

Di satu pihak petani dihadapkan pada masalah tanah garapan yang sempit, di pihak lain masih banyak tanah khususnya di luar Pulau Jawa yang belum memungkinkan untuk digarap. Di samping itu masih banyak hambatan-hambatan lain dari segi kelembagaan, teknik, ekonomi dan infra-

1 Hasil Kongres Nasional I FBSI, 1980, "Buruh Pekerja Pedesaan", p. 8



struktur sektor pertanian yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selama lima tahun terakhir ini jumlah petani di Indonesia ternyata telah bertambah banyak. Juga terdapat distribusi yang tidak merata antara propinsi-propinsi seluruh Indonesia. Meskipun demikian pada saat yang bersamaan terjadi mobilitas atau perpindahan dari lapangan pertanian ke jenis-jenis pekerjaan lain.

Menurut analisa Prof. Soedjito Sosrodihardjo SH, MA dari Universitas Gajah Mada,<sup>1</sup> catatan angka-angka penduduk yang bekerja menurut propinsi dan lapangan kerja utama yang tercantum dalam buku Indikator Sosial (Biro Pusat Statistik 1978), menunjukkan peningkatan jumlah petani akan tetapi penurunan bagian pertanian dalam penyerapan tenaga kerja.

Untuk sektor pertanian, penambahan kesempatan kerja yang akan terjadi tahun 1980-1985 mendatang diperkirakan semakin mengecil, yaitu sekitar 0,01% dibanding dengan penambahan kesempatan kerja 1975-1980 yaitu sebesar 0,04%. Ini merupakan gambaran yang mencerminkan mengingat bahwa sekitar 80% jumlah angkatan kerja di Indonesia berada atau berasal di pedesaan.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan itu timbul suatu kebutuhan untuk menyalurkan tenaga kerja-tenaga kerja tersebut agar mereka tetap dapat bekerja guna menghidupi diri dan keluarganya. Sektor nonpertanian diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan sektor pertanian sekaligus menyerap tenaga kerja pedesaan, dan secara demikian meningkatkan kehidupan para penduduk pedesaan.

Dalam proses perkembangan ekonomi memang akan semakin dirasakan keperluan menunjang kegiatan sektor pertanian oleh sektor di luar pertanian. Di satu pihak, jumlah penduduk yang semakin bertambah akan menyebabkan meningkatnya permintaan bahan makanan pada sektor pertanian. Di lain pihak, penduduk pedesaan yang meninggalkan sektor pertanian dapat tertampung di sektor nonpertanian; sektor nonpertanian ini menyediakan sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sektor pertanian pada khususnya dan penduduk pedesaan pada umumnya. Dengan demikian peningkatan permintaan oleh satu pihak akan disusul oleh permintaan yang semakin bertambah oleh pihak lain. Kedua kegiatan ini diharapkan dapat berkembang bersama dan saling menunjang.

---

1 *Kompas*, 31 Januari 1981

2 *Kompas*, 29 Oktober 1980

## HUBUNGAN SEKTOR NONPERTANIAN DAN SEKTOR PERTANIAN

Kegiatan nonpertanian sebagai kesempatan kerja utama atau sebagai pekerjaan kedua amat penting untuk petani-petani miskin yang tidak memiliki tanah. Di beberapa daerah di Indonesia telah sejak lama dilakukan pekerjaan semacam ini secara tradisional oleh penduduk pedesaan setempat, misalnya, industri rumah tangga (kerajinan tangan, pengolahan makanan) dan industri kecil pedesaan lainnya.

Bidang nonpertanian dapat tumbuh subur dan berkembang di pedesaan. Kegiatan nonpertanian ini tidak perlu dikuatirkan akan menghambat perkembangan sektor pertanian di pedesaan, malahan akan menunjang pertumbuhan sektor pertanian. Sebagian penduduk pedesaan yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani tidak perlu meninggalkan pekerjaannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Di samping bertani, mereka dapat bekerja di luar sektor pertanian sebagai sumber penghasilan kedua. Dengan cara tersebut berarti mereka menambah produktivitasnya dan secara demikian meningkatkan penghasilannya. Waktu luang pada saat menunggu masa panen atau pada musim-musim tertentu dapat diisi dengan pekerjaan-pekerjaan lain di luar sektor pertanian.

Menurut studi yang dilakukan oleh Dennis Anderson dan Mark W. Leiserson di negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin diperoleh komposisi umum kesempatan kerja nonpertanian di pedesaan sebagai berikut: sekitar 20-30% pekerja nonpertanian di pedesaan berada dalam bidang manufacturing; 20-35% pada bidang jasa, termasuk jasa-jasa pemerintah; 15-30% pada kegiatan perdagangan; 5-15% pada kegiatan bangunan; 5% pada bidang transportasi; dan sisanya pada kegiatan-kegiatan lain. Kesempatan kerja dalam bidang manufacturing kebanyakan dikelompokkan menjadi 4 macam kegiatan: 1) pengolahan makanan, 2) tekstil dan pakaian; 3) perkayuan termasuk penggergajian, pembuatan perabot dan pertukang-kayuan biasa; 4) pembuatan benda-benda logam termasuk pandai besi, las, pembuatan dan pemasangan peralatan untuk bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya. Keempat kategori manufacturing ini terutama penting artinya untuk negara-negara yang telah mencapai tingkat perkembangan tertentu.<sup>1</sup> Kenyataannya setiap negara memiliki tingkat pembangunannya masing-masing sehingga perkembangan masing-masing kelompok manufacturing itupun berbeda-beda, tergantung pada teknologi yang dimiliki serta jenis dan kualitas produk akhir yang diminta oleh sebagian besar konsumennya.

---

1 Dennis Anderson & Mark W. Leiserson, "Rural Nonfarm Employment in Developing Countries", *Alert* 43 No. 13

Tingkat kesempatan kerja nonpertanian di pedesaan Indonesia saat ini belum dapat diperkirakan dengan pasti. Kegiatan-kegiatan nonpertanian telah dilakukan oleh penduduk pedesaan secara tradisional. Akan tetapi karena usaha semacam itu dilakukan dalam skala kecil dan di samping itu tersebar pada berbagai kegiatan, maka seringkali lolos dari perhatian petugas sensus. Wanita-wanita pedesaan yang sering mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan kerajinan tangan atau menenun atau membuat sejenis makanan tertentu untuk dijual kepada penduduk sekitar tempat tinggalnya, mungkin tidak tercatat dalam kegiatan nonpertanian menurut klasifikasi yang telah ditentukan dalam statistik.

Karena menurut konsep perhitungan GNP, yang diartikan dengan aktivitas ekonomi adalah<sup>1</sup> aktivitas yang tercatat dalam pasar, maka akibatnya aktivitas di luar pasar tidak tercatat oleh Biro Pusat Statistik. Bagi negara di mana banyak kegiatan ekonomi dilakukan oleh anggota rumah tangga tanpa memperoleh upah (tanpa melalui pasar) seperti menjahit pakaian, reparasi alat-alat pertanian dan pertukangan, memperbaiki rumah dan lain-lain, maka kegiatan itu tidak tercatat oleh Biro Pusat Statistik. Implikasi lain penyediaan data statistik seperti ini ialah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh unit usaha yang tergolong "one man enterprise" tidak tercatat oleh Biro Pusat Statistik. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan nonpertanian di pedesaan saat ini tidak diketahui jumlahnya dengan pasti.

Penyebaran yang luas sektor nonpertanian sebenarnya merupakan akibat banyaknya penduduk Indonesia yang terikat pada sektor pertanian. Dalam keadaan ini, penyebaran penduduk pedesaan akan menyebabkan tersebarnya konsumen barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor nonpertanian tersebut. Penduduk pedesaan yang sebagian besar adalah petani akan berusaha ikut memenuhi permintaan barang dan jasa dari sektor pertanian dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan nonpertanian, sebagai pekerjaan sampingan. Tidak jarang di antara mereka berpindah pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian karena sektor nonpertanian memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk peningkatan penghasilannya.

Transfer sumber-sumber alam baik dalam bentuk barang ataupun tenaga kerja akan selalu terjadi dalam suatu pembangunan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi akan menuju pada bertambahnya pertukaran barang antara sektor pertanian dan sektor nonpertanian. Sektor pertanian akan menawarkan bahan makanan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat di sektor nonpertanian sesuai dengan perkembangan penduduk dan pendapatan. Sebaliknya dengan bertambahnya pendapatan

1 Hidayat P., "Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, vol. XXVI No. 4 Desember 1978



dan daya beli di sektor pertanian, akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dari sektor nonpertanian.<sup>1</sup> (Lihat Diagram Hubungan Sektor Pertanian dan Nonpertanian).

Kesempatan kerja nonpertanian di pedesaan akan bertambah karena beberapa alasan, yaitu: 1) bertambahnya permintaan barang-barang nonpangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan yang akan semakin meningkat dengan bertambahnya pendapatan petani; 2) kebutuhan alat-alat/barang-barang dan jasa bagi sektor pertanian yang semakin meningkat dengan pengembangan sektor pertanian di pedesaan; 3) bertambahnya banyaknya permintaan barang-barang hasil kerajinan tangan baik permintaan yang berasal dari kota maupun dari luar negeri.

Seperti diketahui bahwa pengeluaran untuk barang-barang nonpangan akan cenderung meningkat apabila jumlah pendapatan bertambah (hukum "Engel"). Elastisitas pendapatan untuk permintaan barang-barang dan jasa nonpangan di daerah pedesaan setelah dipelajari ternyata menunjukkan angka yang relatif tinggi. Artinya permintaan barang dan jasa yang berhubungan dengan hasil-hasil pertanian misalnya, peralatan pertanian, perbankan, bangunan, jasa pengolahan, transpor, pemasaran hasil-hasil pertanian cenderung meningkat bila pendapatan bertambah. Pengetahuan penduduk pedesaan tentang barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh penduduk setempat merupakan keuntungan bagi usaha yang bergerak di bidang nonpertanian tersebut. Mereka dapat menyediakan barang-barang dan jasa yang paling banyak permintaannya, yaitu yang memiliki hubungan erat dengan hasil pertanian setempat, sehingga mereka tidak terlalu menghadapi kesulitan memasarkan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya. Macam dan kualitas barang-barang yang dihasilkan biasanya disesuaikan dengan keadaan penduduk pedesaan yang bersangkutan.

Saat ini, penghasilan para petani miskin (tidak memiliki tanah) di pedesaan, sebagian besar digunakan untuk membeli makanan. Dengan pertambahan pendapatan petani dari sumber penghasilan kedua di luar pertanian akan merupakan peningkatan daya beli penduduk pedesaan. Dengan demikian penduduk daerah setempat menjadi pasar yang luas bagi hasil-hasil kegiatan nonpertanian di pedesaan. Sehubungan dengan itu dapat dikemukakan bahwa peningkatan pendapatan petani-petani miskin di pedesaan akan amat bergantung pada kesempatan kerja yang tersedia di luar sektor pertanian di pedesaan. Seberapa jauh para petani ini dapat memenuhi permintaan tenaga kerja di sektor nonpertanian dipengaruhi oleh ketrampilan dan pengalamannya di bidang yang bersangkutan.

1 M. Nazir, *op. cit.*, p. 57

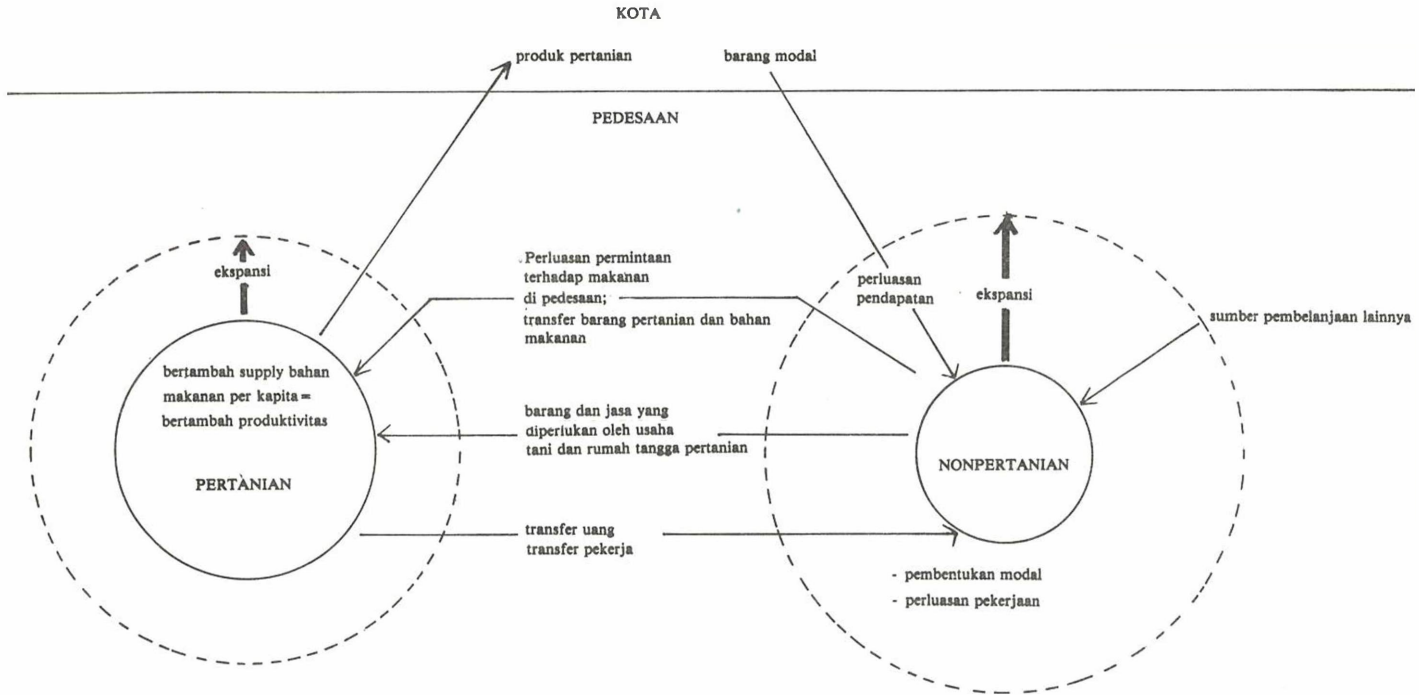


DIAGRAM HUBUNGAN SEKTOR PERTANIAN DAN NON PERTANIAN

Sumber: L. Malassis, *Agriculture and the Development Process*, The Unesco Press, Paris, 1975, p. 165. Lihat juga, "Kaitan antara Sektor Pertanian dan Nonpertanian di Indonesia", *Agro Ekonomika*, No. 11 Tahun X, Oktober 1979, p. 56

## POTENSI ANGKATAN KERJA PEDESAAN UNTUK PEKERJAAN NONPERTANIAN

Dewasa ini terdapat kira-kira 41 juta angkatan kerja yang tersebar di 61.465 buah desa di seluruh propinsi Indonesia. Sehubungan dengan perluasan kesempatan kerja dengan cara pengembangan sektor nonpertanian, perlu dikaji keadaan angkatan kerja di pedesaan. Kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja akan sangat menentukan besarnya pendapatan yang dapat diperoleh dari sektor nonpertanian. Demikian pula, beberapa hasil penyelidikan terhadap negara-negara di dunia memperlihatkan<sup>1</sup> adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat pendapatannya. Ini menggambarkan, semakin tinggi pendidikan yang diperoleh oleh seseorang akan semakin besar pendapatannya.

Pendidikan yang diterima oleh penduduk pedesaan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 1961 jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah sekitar 69% dan kemudian menurun menjadi 45% pada tahun 1971 dan menurun lagi menjadi 34% pada tahun 1976 (lihat Tabel 5). Dengan adanya banyak sekolah dasar Inpres di pedesaan berakibat semakin banyak penduduk pedesaan yang memasuki sekolah dasar. Prosentase pada tahun 1961 sekitar 29,5%, meningkat menjadi 41,3% tahun 1971 kemudian meningkat lagi menjadi 61% pada tahun 1976. Meskipun demikian jumlah yang tidak menamatkan sekolah dasar juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu 19,5% pada tahun 1961, menjadi 33,7% pada tahun 1971, meningkat terus pada tahun 1976 menjadi sekitar 37%. Demikian pula untuk tingkatan SLP dan SMA masing-masing menunjukkan peningkatan. Untuk SLP kejuruan tampaknya semakin lama kurang diminati oleh penduduk pedesaan. Sedangkan untuk SLA kejuruan persentasenya menunjukkan kenaikan.

Meskipun secara umum telah terjadi peningkatan pendidikan penduduk pedesaan namun sampai saat ini hasil-hasilnya belum benar-benar tampak menunjang keadaan pedesaan.

Sangatlah relevan, apabila orang terus mempermasalahkan kota yang menyerap segala potensi desa. Sampai sekarang masalah ini belum dapat diatasi. Kemajuan pendidikan di daerah pedesaan belum menghasilkan sesuatu bagi desa. Persoalannya kembali kepada daya dukung desa. Selama sebuah desa bertahan pada sifat agraris, daya dukungnya tidak mungkin bertambah, sebab ekonomi agraris tergantung pada tanah, sedangkan tanah di desa tidak bertambah lagi. Untuk meningkatkan daya dukungnya, pedesaan

<sup>1</sup> Pande Radja Silalahi, "Peningkatan Pendidikan, Pemerataan Pendapatan dan Perluasan Kesempatan Kerja", *Analisa* Juni 1980, p. 512 (lihat juga catatan kaki no. 1)

Tabel 5

PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN DAN LEBIH YANG TERMASUK ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DI PEDESAAN INDONESIA (PROSENTASE)

Pendidikan yang ditamatkan	tahun 1961	tahun 1971	tahun 1976
Tidak sekolah	69,1	45,2	34,0
Belum tamat SD	19,5	33,7	37,0
SD	10,0	17,6	24,0
SLP: - umum	0,7	1,8	2,5
- kejuruan	0,5	0,4	0,1
SLA: - umum	0,1	0,8	0,5
- kejuruan	0,1	0,5	1,5
Akademi	0,0*	0,0*	0,0*
Universitas	0,0*	0,0*	0,0*
Jumlah	100,0**	100,0**	100,0**

Sumber: Diolah dari hasil Sensus Penduduk tahun 1961, tahun 1971<sup>1</sup>, serta Sakernas 1976, Biro Pusat Statistik

Catatan: \* kurang dari satu per seribu

\*\* angka-angka dibulatkan

harus mengubah diri.<sup>2</sup> Desa harus memiliki kegiatan selain pertanian juga kegiatan-kegiatan nonpertanian.

Selama ini para pemuda pedesaan yang berbakat belum melihat desa sebagai tempat untuk menyumbangkan tenaga dengan imbalan yang layak. Apabila ada pemuda yang berbakat masih mau tinggal di pedesaan, dia harus bersedia untuk berbagi pendapatan dengan para petani yang kebanyakan miskin. Di pedesaan yang tidak semata-mata agraris tetapi telah ada kegiatan nonpertanian yang berkembang, pemuda berbakat dapat menyumbangkan tenaga sesuai dengan ketrampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Keadaan semacam ini akan banyak menolong memberikan kesempatan kerja kepada para penduduk pedesaan yang memiliki pendidikan atau ketrampilan khusus. Maka tenaga cakap<sup>3</sup> berasal dari pedesaan dapat berkembang di tempat asalnya dan tidak selalu terserap ke kota.

1 N. Iskandar, "Keadaan dan Arah Perkembangan Angkatan Kerja di Indonesia", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, vol. XXIII, No. 3 September 1975, p. 280

2 *Kompas*, 21 Januari 1981. Apakah kenyataan ini merupakan akibat dari adanya "time lag" masih harus diselidiki lebih lanjut.



Di samping pendidikan formal, penduduk pedesaan dapat memperoleh ketrampilan dalam bidang-bidang nonpertanian melalui proses magang ataupun kursus-kursus. Bekerja dengan sistem magang ini memberikan kemungkinan lebih besar bagi penduduk pedesaan untuk memperoleh pengalaman dan ketrampilan tertentu. Biasanya setelah tenaga kerja tersebut mampu bekerja tanpa bimbingan lagi, mereka akan membuka usahanya sendiri. Kebutuhan sistem magang ataupun kursus-kursus dan latihan-latihan amat dirasakan di pedesaan dengan semakin terbukanya peluang usaha di bidang nonpertanian. Saat ini belum banyak penduduk pedesaan yang telah menyelesaikan kursus-kursus ataupun bekerja dengan sistem magang. Tetapi lambat laun jumlah ini akan semakin bertambah mengingat daerah pedesaan merupakan tempat yang amat sesuai bagi pengembangan sektor nonpertanian.

Menurut Sakernas 1976 di antara sekitar 41 juta angkatan kerja di pedesaan hanya kira-kira 673 ribu yang pernah mendapat ketrampilan/kursus-kursus. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ketrampilan tersebut berbeda-beda tergantung pada macam ketrampilan yang dikehendaki (lihat Tabel 6). Pembuatan pakaian merupakan jenis ketrampilan yang paling banyak diikuti, yaitu berkisar antara 175 ribu orang pernah mengikuti kursus menjahit. Setelah menjahit, kursus yang paling banyak diikuti oleh penduduk

Tabel 6

---



---

PENDUDUK PEDESAAN YANG MENDAPAT KETRAMPILAN/KURSUS MENURUT LAMANYA MENGIKUTI KURSUS

---

Jenis Ketrampilan	2-3 bln	4-6 bln	7-9 bln	10-12 bln	13 bln lebih	Total
Ketataniagaan & perkantoran	64.863	28.170	3.372	6.252	5.169	107.826
Pengerjaan logam, kelistrikan	2.072	3.158	-	656	474	6.360
Bangunan	1.783	306	-	1.671	1.000	4.760
Pariwisata/perhotelan	6.329	2.209	474	260	1.194	10.466
Pembuatan pakaian	72.127	63.440	7.975	26.592	5.845	175.979
Seni budaya & kerajinan	10.947	3.932	526	656	3.375	19.436
Bahasa	20.404	6.976	3.421	8.049	4.522	43.372
Pertanian	19.686	10.410	4.554	8.362	2.067	45.079
Lain-lain	134.554	67.647	13.257	28.240	16.281	259.979

---

Total 331.765 186.248 33.579 80.738 39.927 673.257

---

pedesaan adalah ketata niagaan dan perkantoran. Sekitar 107 ribu orang pernah mengikutinya dalam jangka waktu yang berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Sedangkan jenis kursus yang lain diikuti oleh kurang dari 50 ribu orang untuk masing-masing ketrampilan.

Jumlah yang dinyatakan dalam Tabel 6 tersebut sebenarnya relatif masih amat sedikit. Kesempatan kerja nonpertanian di pedesaan membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja yang trampil. Latihan-latihan dan kursus-kursus hendaknya digalakkan dan dikembangkan sesuai dengan potensi desa. Pengalaman selama belajar atau bekerja dalam sistem magang akan sangat berguna dalam pekerjaannya kelak. Kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja sektor nonpertanian akan sangat menentukan besarnya pendapatan. Hal ini sekaligus berarti para penduduk pedesaan tidak perlu pergi ke kota untuk mencari tambahan nafkahnya. Proses ini juga dapat merangsang tingkat desentralisasi pertumbuhan kota yang memberikan kesempatan kerja tambahan bagi penduduk pedesaan dengan cara meningkatkan produktivitasnya.

## KESIMPULAN

Uraian ini bermaksud meninjau pentingnya perluasan kegiatan nonpertanian dilihat dari sudut sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan angkatan kerja pedesaan. Kegiatan nonpertanian di pedesaan merupakan sumber penghasilan kedua pada saat-saat musim sepi terutama bagi para petani yang tidak memiliki tanah. Areal tanah pertanian yang bertambah menyebabkan lambatnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Untuk tahun 1980-1985 mendatang pertambahan kesempatan kerja sektor pertanian akan semakin kecil yaitu sekitar 0,01% dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,04%. Kecenderungan menurunnya kesempatan kerja pertanian menyebabkan pentingnya arti kegiatan nonpertanian di pedesaan untuk dikembangkan. Meskipun jumlah kegiatan nonpertanian khususnya di pedesaan saat ini belum dapat diperkirakan dengan pasti karena seringkali tidak tercatat oleh Biro Pusat Statistik, namun perlu dipikirkan pengembangannya lebih lanjut. Perencanaan kebijaksanaan pedesaan selain menunjang kegiatan pertanian juga harus memperhatikan kegiatan nonpertanian agar keduanya dapat bersama-sama saling menunjang dalam memperbaiki kehidupan rakyat pedesaan.